

ABSTRAK

Konsepsi Masyarakat Terhadap Kekuasaan Raja Jambu Lipo (1975-2011).

Oleh : Ayyu Herliyatin

Permasalahan dalam penelitian ini adalah semenjak Indonesia merdeka dan sistem ketatanegaraan sudah berubah. Jadi, secara politis Kerajaan Jambu Lipo sudah tidak ada, akan tetapi wujudnya ditengah-tengah masyarakat masih cukup kuat. Wujud tersebut tidak saja mewarnai interaksi dikalangan masyarakat Lubuk Tarok Kab. Sijunjung, tapi juga di Kab. Dharmasraya. Hal ini menandakan bahwa hidupnya suatu konsepsi di tengah masyarakat terhadap Raja atau Kerajaan Jambu Lipo, yang bisa mempengaruhi sikap hidup, bahkan sikap politiknya, walau tanpa disadari. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pemahaman masyarakat terhadap Raja Jambu Lipo dari periode ke periode, dilihat dari beberapa konsepsi, yaitu 1) Hubungan Raja dan Rakyat, 2) Sifat Raja, 3) Daerah/Wilayah Kekuasaan, 4) Simbol-simbol/Legitimasi Kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan lebih lanjut juga digunakan pendekatan diakronis, yaitu untuk melihat perkembangan tentang pemahaman masyarakat dalam periode yang berbeda-beda. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan. Data diperoleh langsung turun ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap objek yang diteliti serta dari dokumentasi-dokumentasi yang ada sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsepsi masyarakat Jambu Lipo tentang kekuasaan Raja dengan menggunakan indikator yang mengikuti pola Soemarsaid dan mengikuti pola Geldren, tampak hanya sebagian konsepsi yang berkembang dalam masyarakat, baik masyarakat daerah rantau maupun daerah inti, dan sebagiannya lagi berkembang dalam Kerajaan atau lingkungan Istana. Konsepsi masyarakat Jambu Lipo: (1) Hubungan Raja dan Rakyat, ditandai pada pola-pola adat dan budaya seperti, Raja *manjalangi* rantau dalam sekali tiga tahun. Ketika *manjalangi* rantau penghormatan terhadap raja mulai berubah dari periode ke periode, hal ini disebabkan karena ikut berubahnya suatu sistem Pemerintahan bernegara. (2) Konsepsi sifat Raja, Raja diukur atau dipandang dari benar salahnya, bila kata-katanya benar akan dituruti dengan baik oleh rakyatnya, bila kata-kata dan pikirannya tidak benar, tidak diikuti oleh rakyatnya. Raja bersifat demokratis, ini terlihat ketika melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan lebih terlihat lagi pada periode Nagari (1975-1983). (3)Konsepsi Wilayah Kekuasaan, secara administratif mempengaruhi adat istiadat dan dari periode Nagari sampai Desa masih terlihat sama, baru pada periode Nagari (1999-2011) ada perubahan. (4)Konsepsi simbol-simbol Kerajaan, yang menjadi simbol paling tinggi Kerajaan Jambu Lipo adalah keris "*sakin saka daguak*".